

BAB V

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

5.1. Capaian Kinerja Indikator dan Target Misi RPJMD

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Jawa Tengah “Menuju Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan daerah. Untuk mengetahui kinerja tiap misi, dilakukan evaluasi melalui pengukuran terhadap indikator sasaran dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Bab V. Selain melakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja per misi, juga dilakukan evaluasi terhadap keselarasan antara misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Evaluasi capaian kinerja indikator sasaran pada tiap misi dan keselarasannya tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi 1 merupakan kerangka atas 6 (enam) misi yang lain serta sebagai *guideline* agar transformasi nilai Trisakti terlihat dalam setiap misi. Keenam misi tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan program unggulan dan program pembangunan dalam pembangunan jangka menengah Tahun 2013-2018. Capaian misi 1 dalam RPJMD digambarkan dari sasaran meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno dengan indikator sasaran persentase capaian sasaran pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 1 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno	Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno	Persentase capaian sasaran pembangunan	-	-	-	100	-	-	-	-		Realisasi capaian indikator misi 1 diukur pada Tahun 2016 dan Tahun 2018	Pengukuran ketercapaian misi pada evaluasi paruh waktu (Tahun 2016) dan evaluasi akhir periode RPJMD 2013-2018 (Tahun 2018)

Realisasi ketercapaian Misi 1 diukur pada tahun 2016 sebagai hasil evaluasi paruh waktu dan tahun 2018 pada evaluasi akhir periode RPJMD 2013-2018. Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Oleh karena misi pertama ini merupakan haluan pada enam misi yang lain, maka tingkat keselarasan dengan sasaran dan indikator sasaran dinilai selaras. Evaluasi keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada misi 1 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Misi 1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno	Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno	Persentase capaian sasaran pembangunan	√				

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 2 yaitu: (1) Menurunnya angka kemiskinan; (2) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; (3) Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; (4) Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal; (5) Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM; (6) Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan; (7) Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas; (8) Meningkatnya realisasi investasi; (9) Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak; (10) Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus; (11) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan; (12) Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat; dan (13) Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

Sasaran pencapaian misi tersebut diukur dengan 39 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian kinerja indikator sasaran pada misi 2 sampai dengan tahun 2015 yaitu sejumlah 10 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 23 target indikator kinerja berstatus akan tercapai, dan sebanyak 6 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang capaiannya berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase angka kemiskinan; Jumlah produksi tebu; Jumlah produksi daging; Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi; APM SD/MI/SLB/Paket A; dan Jumlah kewirausahaan pemuda. Secara rinci capaian kinerja indikator sasaran misi 2 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 2 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
1. Menurunkan jumlah penduduk miskin	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	14,44	11,58 s.d 11,37	9,05 s.d 8,75	7,80 s.d 7,60	13,58	NA	13,58 (Sep 2014)	25,90		Capain kinerja masih terlampau jauh dari target yang telah ditetapkan.	Melakukan perubahan target akhir dengan memperhatikan progres capaian kinerja dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019
2. Menurunkan jumlah penganggur	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,02	5,31 s.d 4,77	4,93 s.d 4,62	4,32 s.d 4,20	5,68 (Agus- tus 2014)	4,99 (Agus- tus 2015)	4,99 (Agustus 2015)	81,19		- Kecenderungan capaian TPT dalam dua tahun cenderung membaik. - Target penurunan TPT akan tercapai apabila tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi seperti kondisi perekonomian dunia yang dapat menyebabkan terjadinya PHK serta menurunnya minat investasi	Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan TPT : 1. Meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja (Kewirausahaan, Penempatan TK melalui AKAL AKAD, AKAN, Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja) 2. Peningkatan pelatihan dan keterampilan kerja di BLK. 3. Meningkatkan rata-rata lama sekolah 12 tahun. 4. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
													pekerja. 5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja. 6. Kemudahan kebijakan regulasi pemerintah dalam pelayanan ijin investasi melalui PTSP (Perijinan Terpadu Satu Pintu)
3. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi	a. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	1) Jumlah regulasi kedaulatan pangan	6	1	1	11	1	1	8	72,72		Pergub tentang pelaksanaan Perda LP2B hingga TW III masih dalam proses penyusunan, dan diperkirakan akan selesai pada akhir Triwulan IV 2015	
		2) Ketersediaan pangan utama	5.701.257	5.724.620	5.746.958	5.816.198	5.732.400	6.299.495	6.299.495	108,31			
		3) Persentase penguatan cadangan pangan	60	75	80	100	100,24	129,69	129,69	129,69			
		4) Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah	95	97	100	100	97,22	75	75	75		Target waktu pengumpulan informasi stok dan harga dilaksanakan selama 52 minggu, sampai TW 3 baru terlaksana 39 minggu dan akan dilanjutkan sd tw IV sehingga dapat terpenuhi 52 minggu	Koordinasi dgn Kab/Kota agar dapat terpenuhi informasi stok dan harga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
		5) Skor Pola Pangan Harapan	90	90,75	91,13	92,23	91,78	91,45	91,45	99,15		masih dalam proses penghitungan karena ada penyesuaian software penghitungan Skor PPH dari BKP Kementan RI	Koordinasi dengan Kab/Kota yang belum menyelesaikan penghitungan hasil survei.
		6) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	80	86,60	87,65	87,65	109,56			
		7) Persentase penanganan daerah rawan pangan	50	55	60	60	56,25	25,81	25,81	43,02		Adanya perubahan payung hukum (Peraturan Gubernur) tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, dimungkinkan untuk memperluas penanganan daerah rawan pangan yang sebelumnya hanya untuk daerah darurat rawan pangan akibat bencana (Pergub lama) saja, menjadi juga untuk daerah rawan pangantransien (ketidakmampuan daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum) sesuai regulasi baru (Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Target akhir 2018 akan tercapai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
												No. 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).	
		8) Jumlah produksi padi (Juta Ton)	10,14	10,18	10,22	10,35	9,65	11,04	11,04	107,2			
		9) Jumlah produksi tebu (Juta Ton)	5,02	5,12	5,22	5,54	5,56	3,26	3,26	59		Angka triwulan III, Untuk Pabrik Gula wilayah Pantura melepas kerjasama operasional. Hal tersebut berakibat pada minat petani yang berkurang karena alih komoditas	Koordinasi dgn Kab/Kota
		10) Jumlah produksi daging (Juta Kg)	265,14	274,42	282,66	308,87	266,19	209,90	209,90	68		Produksi daging masih jauh dari target disebabkan oleh: a. Kenaikan harga daging khususnya sapi menyebabkan penurunan pemotongan ternak sapi di Jawa Tengah hingga 12,54% yang berakibat pada penurunan jumlah produksi daging sapi sebesar 8,43% . b. Pembatasan import sapi oleh pemerintah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
												pusat dan harga jual yang lebih tinggi di DKI, Jawa Barat, Banten menyebabkan Jawa Tengah sebagai salah satu pemasok ternak sapi banyak yang terserap ke daerah tersebut. Sehingga ikut menyumbang penurunan jumlah pemotongan sapi di RPH Jawa Tengah.	
		11) Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Keahlian	34,01	40	50	80	40	48,5	48,5	61		Pelaksanaan Pelatihan dilakukan secara bertahap, diperkirakan target Tahun 2015 akan tercapai.	
		12) Tingkat konsumsi ikan	17,82	18,69	19,59	22,56	20,92	Baru ada pada akhir tahun	20,92	92,73		Untuk Angka Konsumsi makan Ikan perhitungannya <i>year minus one</i> , karena metode perhitungan AKI = A+B+C Dimana A adalah angka resmi susenas (survey ekonomi nasional) yang dilakukan oleh BPS se Indonesia, sedangkan B adalah angka koreksi yang harus	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
												dihitung oleh DKP Provinsi berdasarkan perhitungan konsumsi di luar rumah seperti catering, hotel dan rumah makan, dan C adalah angka koreksi untuk jenis ikan di luar form kuesiner BPS (jadi angka perhitungan menunggu dari BPS)	
	b. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	1) Rasio Elektrifikasi	82,12	85,02	87,42	92,12	88,37	89,29	89,29	96,93		Realisasi Rasio Elektrifikasi Tahun 2015 lebih tinggi daripada target 2015	
		2) Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	6,1	6,92	7,74	10,2	7,01	7,06	7,06	70		Pemerintah belum menetapkan harga jual listrik dari EBT kecuali sampah, sehingga harga jual masih lebih ekonomis BBM dibandingkan EBT	
4. Mengembangkan Koperasi dan UMKM	a. Meningkatkan jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM	1) Jumlah produk/ komoditas OVOP	70	105	140	245	105	140 (Sept)	140	57,14			
		2) Persentase koperasi sehat	15,02	15,70	16,20	19,50	15,96	18,11 (Sept)	18,11	93			
		3) Persentase koperasi aktif	79,73	80,71	81,05	82,50	81,20	81,53 (Sept)	81,53	98,63			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
5. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan	a. Meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan	1) Jumlah UP2K yang aktif (unit)	332	200	200	200	140	0	140	70,00		- Penghitungan BUMDes dan Pasar Desa didasarkan pada penghitungan angka kumulatif (target dikurangi realisasi sebelumnya). - UP2K PKK tidak merubah target hanya merubah satuan pada indikator sasaran dari unit menjadi kelompok. - Penghitungan UED SP didasarkan pada penghitungan angka kumulatif (target dikurangi realisasi sebelumnya). Perubahan pada satuan sasaran indikator semula unit menjadi kelompok. - Indikator sasaran UP2K PKK dan BUMDes belum dilaksanakan karena adanya kebijakan pada pasal 298 UU 23 tahun 2015 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum.	- Pada indikator sasaran (Jumlah UP2K PKK yang aktif dan Jumlah BUMDes yang terbentuk) yang belum dilaksanakan tahun 2015 akan dipenuhi melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016. - Pada indikator sasaran Jumlah Pasar Desa yang Direvitalisasi dan Jumlah UED SP yang aktif dalam rangka percepatan pencapaian target akhir tahun 2018 sebagai target sasaran akan dipenuhi melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016.
		2) Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	119	148	183	253	RPJMD: 153	0	153	60,47			
		3) Jumlah pasar desa yang direvitalisasi (unit)	196	246	311	461	RPJMD: 225	7	232	50,33			
		4) Jumlah UED-SP yang aktif (unit)	173	248	333	553	RPJMD: 208	11	219	39,60			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
6. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri	a. Meningkatkan kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	1) Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	4,70	5,20	5,20	5,20	8,04	5,44	5,44	104,62		Realisasi kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2014 tidak tercapai dikarenakan pengelompokan kategori perdagangan yang semula meliputi perhotelan dan restoran, diubah hanya meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan reparasi sepeda motor	Pada tahun 2015 target kontribusi sektor perdagangan telah disesuaikan dengan pengelompokan yang ditentukan oleh BPS
		2) Kontribusi Sektor terhadap PDRB (%)	31,6	32,1	32,3	32,6	36,31	35,8	35,80	109,82			
7. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi	a. Meningkatkan realisasi investasi	1) Jumlah investor (PMA/ PMDN)	32	33	36	40	83	925	1.008	544,8			
		2) Nilai investasi (Trilyun)	3,088	3,228	3,374	3,846	11,068	17,988	29,056	167,57			
8. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan	a. Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan anak	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,97	67,63	68,22	69,99	NA	NA	67,97 (2013)	97,11		IPG dan IDG diterbitkan 2 tahun lebih lambat dari tahun berjalan.	Menunggu diterbitkan oleh BPS dan Kemen PPPA.
	b. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan	1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,22	69,99	70,49	71,99	NA	NA	71,22 (2013)	98,93			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
	terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	2) Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak	48,6	62,8	77,1	100	80	88,57	88,57	88,57		Diperkirakan akhir tahun 2018 akan tercapai karena sampai dengan tahun 2015 hanya menyisakan 4 Kab/Kota yang belum mendeklarasikan menuju kota layak anak.	
	c. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	1) APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,60	99,42	100	100	98,32	98,43	98,43	98,43		Target sulit tercapai karena banyaknya anak usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah di SD dan usia 12 tahun sudah masuk SMP, sehingga tidak masuk dalam hitungan APM SD/MI. Kondisi ini sangat mempengaruhi capaian APM SD/SDLB/MI/Paket A.	Target capaian indikator perlu direvisi karena target RPJMD yang ditetapkan pada dokumen perencanaan tidak akan tercapai karena pada prakteknya selalu terjadi pergeseran usia masuk sekolah jenjang SD/SDLB/MI/Paket A.
		2) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100,52	100,54	100,56	100,60	100,54	100,69	100,69	100,08			
		3) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	79,00	79,20	79,30	80,00	77,83	79,51	79,51	99,39			
		4) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	70,00	72,00	74,00	80,00	73,05	74,01	74,01	92,51			
	d. Meningkatnya kualitas dan keterampilan	1) Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	286 desa	35 desa	35 desa	461 desa	35 desa	35 desa	356 desa	77,22			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
	masyarakat	2) Jumlah pelaku/ kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemas- yarakatan	40.481	37.50 0	38.00 0	195.50 0	39.92 5	38.925	78.850	40,33		- Capaian indikator dikmas akan tercapai, namun demikian tren penganggaran untuk dikmas mengalami penurunan. - Selain itu, memperhatikan kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan sesuai UU No 23 Tahun 2014, ke depan anggaran pendidikan lebih diprioritaskan untuk pengelolaan dikmen dan diksus	Target indikator perlu dilakukan penyesuaian
		3) Jumlah kewirausaha- an pemuda	380 org (80 Klpk)	560 org (80 klpk)	650 org (85 Kplk)	3.310 org (430 Klpk)	560 org (113 klpk)	520 org (34 Klpk)	1.080 org (147 Klpk)	32,63		Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, disebabkan kelompok penerima bantuan belum seluruhnya berbadan hukum Indonesia (sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat 5).	Upaya yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada calon kelompok penerima bantuan untuk memproses legalitas kelompok /lembaga/ organisasi.
9. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi	a. Meningkat- nya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam	1) Persentase penanganan PMKS	2,62	0,63	0,64	0,62	0,61	0,63	0,63	101,61			
		2) Persentase penguatan kapasitas PSKS	4,66	4,87	5,01	5,42	4,87	5,01	5,01	92,44			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
PMKS	memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM												

Selain melakukan evaluasi capaian kinerja, juga dilakukan evaluasi untuk mengetahui keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada misi 2 RPJMD. Secara keseluruhan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada misi 2 telah selaras. Terdapat dua indikator yang kurang selaras untuk menggambarkan sasaran yaitu pertumbuhan industri pengolahan dan kontribusi sektor pada PDRB. Secara rinci penjelasan dan rekomendasi terhadap keselarasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1. Menurunkan jumlah penduduk miskin	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	V				
2. Menurunkan jumlah penganggur	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	V				
3. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi	a. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan	1) Jumlah regulasi kedaulatan pangan	V			Tujuan ketiga dari Misi 2 diarahkan kepada pencapaian Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi. Mendasarkan hal tersebut maka sasaran dan indikator sasaran diarahkan pula untuk pencapaian Kedaulatan Pangan dan Energi.	
		2) Ketersediaan pangan utama	V				
		3) Persentase penguatan cadangan pangan	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	4) Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah	V			1. Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan merupakan salah satu alat dalam mencapai kedaulatan pangan. Hal tersebut mendasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan bahwa pemerintah Provins harus menyusun dokumen perencanaan pangan. 2. Indikator produksi padi, tebu dan lain sebagainya bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi, bukan sebagai indikator Desa Berdikari. 3. Produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, tidak masuk dalam indikator sasaran Misi 2, namun indikator tersebut menjadi indikator sasaran program (Bab VIII dan IX).	
		5) Skor Pola Pangan Harapan	V				
		6) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	V				
		7) Persentase penanganan daerah rawan pangan	V				
		8) Jumlah produksi padi (Juta Ton)	V				
		9) Jumlah produksi tebu (Juta Ton)	V				
		10) Jumlah produksi daging (Juta Kg)	V				
		11) Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Keahlian	V				
		12) Tingkat konsumsi ikan	V				
	b. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	1) Rasio Elektrifikasi	V			Rasio Elektrifikasi dan persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui ketersediaab energi dibandingkan dengan potensi lokal	
		2) Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
4. Mengembangkan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM	1) Jumlah produk/ komoditas OVOP	V			Meningkat mayoritas usaha di Jateng merupakan UMKM, serta Koperasi adalah sokoguru perekonomian kita, maka pengembangan Koperasi dan UMKM akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.	
		2) Persentase koperasi sehat	V				
		3) Persentase koperasi aktif	V				
5. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan	Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan	1) Jumlah UP2K yang aktif (unit)	V			- Penghitungan BUMDes dan Pasar Desa didasarkan pada penghitungan angka kumulatif (target dikurangi realisasi sebelumnya) - UP2K PKK tidak merubah target hanya merubah satuan pada indikator sasaran dari unit menjadi kelompok - Penghitungan UED SP didasarkan pada penghitungan angka kumulatif (target dikurangi realisasi sebelumnya). Perubahan pada satuan sasaran indikator semula unit menjadi kelompok. - Indikator sasaran UP2K PKK dan BUMDes belum dilaksanakan karena adanya kebijakan pada pasal 298 UU 23 tahun 2015 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum.	- Pada indikator sasaran (Jumlah UP2K PKK yang aktif dan Jumlah BUMDes yang terbentuk) yang belum dilaksanakan tahun 2015 akan dipenuhi melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016. - Pada indikator sasaran Jumlah Pasar Desa yang Direvitalisasi dan Jumlah UED SP yang aktif dalam rangka percepatan pencapaian target akhir tahun 2018 sebagai target sasaran akan dipenuhi melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016.
		2) Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	V				
		3) Jumlah pasar desa yang direvitalisasi (unit)	V				
		4) Jumlah UED-SP yang aktif (unit)	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
6. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	1) Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)		V		Produk ekspor lebih banyak dihasilkan oleh industri manufaktur besar dan sedang dalam kelompok industri minuman, industri barang galian bukan logam, industri komputer, barang elektronik dan optik, industri makanan, tekstil, furniture, pengolahan tembakau, pakaian jadi, karet dan barang dari karet, plastik serta industri alat angkutan yang keseluruhannya diakumulasikan menjadi produksi industri manufaktur.	Indikator sasaran pertumbuhan industri pengolahan (%) diubah menjadi pertumbuhan industri produksi pengolahan (%).
		2) Kontribusi Sektor terhadap PDRB (%)		V		Perekonomian Jawa Tengah diukur berdasarkan besaran PDRB, dimana lapangan usaha ekonomi diantaranya meliputi industri pengolahan dan perdagangan (besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor).	Kontribusi sektor terhadap PDRB lebih spesifik berdasarkan lapangan usaha yaitu industri pengolahan dan perdagangan (besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor).
						Indikator sasaran tidak relevan dengan sasaran dan tujuan. Pertumbuhan industri pengolahan dan kontribusi sector terhadap PDRB tidak secara langsung menunjukkan peningkatan kualitas produk unggulan.	Indikator yang menunjukkan kualitas adalah: Cakupan produk yang memenuhi standar-standar tertentu misalnya SNI, standar-standar internasional yang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
						Sasaran pengendalian impor tidak relevan dengan tujuan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri seharusnya terjadi karena permintaan terhadap produk dalam negeri oleh masyarakat meningkat. Peningkatan tersebut bisa terjadi sebagai akibat kualitas produk dalam negeri yang semakin baik, kesadaran masyarakat akan keunggulan produk dalam negeri yang semakin meningkat, dsb. Belum ada indikator yang mengukur tujuan meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri	spesifik bagi produk spesifik. Untuk tujuan meningkatnya produk dalam negeri sebaiknya sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan pemasaran produk dalam negeri. Indikatornya adalah: - Konsumsi produk dalam negeri oleh masyarakat meningkat. - Konsumsi impor barang-barang jadi turun.
7. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1) Jumlah investor (PMA/ PMDN)	V			Peningkatan iklim investasi yang kondusif mendorong tumbuhnya minat berinvestasi dan diharapkan dapat: • Menciptakan lapangan kerja baru; • Memberikan pendapatan baru; • Meningkatkan daya beli; • Mengurangi kemiskinan	
		2) Nilai investasi (Trilyun)	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
8. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan	a. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak b. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	V				
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	V				
		3) Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak	V				
	c. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	1) APM SD/SDLB/MI/ Paket A	V			- Sasaran dan indikator pendidikan sudah ada di Misi ke-6. - Namun, indikator pada misi ini diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, utamanya pemberian BSM Dikmen dan Diksus, serta penyaluran BOS (APBN)	
		2) APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	V				
		3) APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	V				
		4) APK SMA/SMALB/ MA/SMK/Paket C	V				
	d. Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat	1) Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	V				
		2) Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan	V				
		3) Jumlah kewirausahaan pemuda	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
9. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	1) Persentase penanganan PMKS	V			- PMKS yang mendapatkan penanganan secara umum tergolong masyarakat miskin. - PSKS yang mendapatkan pemberdayaan adalah orang/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	
		2) Persentase penguatan kapasitas PMKS	V				

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 3 yaitu: (1) Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi; (2) Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas; (3) Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (4) Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (5) Terwujudnya tertib administrasi; (6) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (7) Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; (8) Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; serta (9) Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran tersebut diukur dengan 12 indikator sasaran, dengan capaian sebanyak 8 target indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Opini BPK (WTP) dan Jumlah peraturan per undang-undangan yang disusun. Secara rinci kinerja pencapaian sasaran misi 3 dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 3 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
1. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima	a. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan provinsi	1) <i>Indonesia Governance Index</i> (IGI)	5,90	5,92	5,94	6,00	NA	NA	NA	NA	NA	IGI bukan merupakan indikator yang digunakan dalam RPJMN 2015-2019, melainkan indikator yang diukur oleh organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan. IGI provinsi diukur terakhir kali pada tahun 2013 dengan menggunakan data tahun 2012, selanjutnya tidak lagi dilakukan pengukuran karena menunggu kebijakan dari negara donor.	IGI dihilangkan dari indikator RPJMD 2013-2018, sebagaimana hasil konsultasi tertulis dengan Bappenas. (Surat Direktur Aparatur Negara Bappenas Nomor 4681/Dt.2.4/07/2015 tanggal 28 Juli 2015)
	b. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas	1) Promosi Jabatan Struktural secara terbuka	Es. I, III,IV	Es. I, II, III, IV	Es. I, II, III, IV	Es. I, II, III, IV	Es. I, II, III, IV	Es. II	Es I, II, III, IV	100		Promosi jabatan secara terbuka Th. 2014 dilaksanakan untuk posisi Es. I, II, III dan IV sudah terealisasi 100% sedangkan Th. 2015 hanya dilakukan untuk Es. II, III dan IV. Sampai dengan TW.III baru terealisasi 40%.	Target Promosi Jabatan Secara Terbuka Th. 2015 diubah menjadi Es. II, III, IV
	c. Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	1) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	9	11	13	19	12	16	16	84,21			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
	d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1) Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui PTSP	100	100	100	100	100	100	100	100			
	e. Terwujudnya tertib administrasi	1) Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%)	85,17	100	100	100	88,07	88,07	88,07	88,07			
		2) Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akte kelahiran	31,49	45	55	80	81,37	81,37	81,37	101,71			Hasil release akhir tahun 2015
		3) Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	35	35	35	35	35	35	35	100			
2. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel	a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	1) Implementasi Aksi PPK	Prov, Kab. Pe-malang, Kota Se-marang	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	100			
	b. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	1) Opini BPK (WTP)	Prov, 10 k/k	Prov, 13 k/k	Prov, 16 k/k	Prov, 35 k/k	Prov, 11 k/k	NA	Prov, 10 k/k	30,56		Opini WTP atas LK Pemda Th. 2015 baru akan terbit Th. 2016	Perlu revisi target opini WTP kabupaten sebesar 60% dan kota sebesar 65% mengacu pada sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
	c. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1) Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 SKPD	2 SKPD	15 SKPD	59 SKPD	2 SKPD	59 SKPD	59 SKPD	100			
3. Melaksanakan penegakan hukum	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1) Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disusun	17 perda	17 perda	15 perda	77 Perda	17 Perda	3 Perda	20 Perda	18,18		Berdasarkan Prolegda Tahun 2015 telah ditetapkan 19 Raperda, yang terdiri dari : a. 6 Raperda Lanjutan 2014 b. 5 Raperda Inisiatif DPRD c. 5 Raperda usulan Eksekutif d. 3 Raperda Kumulatif Terbuka Eksekutif (Biro Hukum) telah melakukan pembahasan terhadap 5 Raperda yang merupakan usulan eksekutif yang terdiri dari raperda tentang : a. Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah. b. Raperda tentang Kesejahteraan Sosial. c. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. d. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Rawapening. e. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cepu. Dari kelima Raperda usulan eksekutif nomor 1 dan 2 telah dilakukan pembahasan dan disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.	Telah ditetapkan Keputusan DPRD Prov. Jateng No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD prov. Jateng No. 45 Th. 2014 ttg Program Pembentukan Perda Prov. Jateng Th. 2015 sebagai pengganti Raperda yang dicabut. Selanjutnya untuk mendorong pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, dalam setiap surat penyampaian Raperda kepada DPRD, Gubernur selalu menyampaikan agar Raperda tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat langsung dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
												Selanjutnya Raperda nomor 3 sedang dilakukan pembahasan oleh Biro Hukum dan akan segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama. Sedangkan Raperda Nomor 4 dan Nomor 5 telah dilakukan pembahasan di Biro Hukum, namun tidak disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama dikarenakan adanya perkembangan regulasi yaitu SE Menko Bidang Perekonomian No. S-136/M.EKON/07/2015 tentang Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Dan Kabupaten dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Sumber Daya Air. Sehingga kedua Raperda dimaksud, diganti dengan 2 (dua) Raperda baru yaitu : a. Raperda tentang Pengalihan Badan Hukum PD BPR BKK menjadi PT. BPR BKK dan PD BKK menjadi PT. BKK. b. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Keduanya telah dibahas di biro hukum dan dalam proses penyampaian ke DPRD untuk dilakukan pembahsan bersama (Surat Gubernur kepada DPRD).	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
												Ditetapkannya 3 Raperda menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari peran DPRD dalam melakukan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.	
		2) Persentase penindakan pelanggaran perda	100	100	100	100	100	100	100	100			

Guna melihat keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran misi 3, dilakukan evaluasi keselarasan dengan hasil bahwa hanya satu indikator yang dinilai kurang selaras yaitu *Indonesia Governance Index* (IGI), karena IGI dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah dan tidak bersifat kontinyu, sehingga perlu dilakukan penyelarasan terhadap indikator ini. Indikator sasaran lainnya dinilai masih selaras dengan tujuan dan sasaran misi 3. Secara rinci vvaluasi keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada misi 3 dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Misi 3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima	a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi	1) <i>Indonesia Governance Index</i> (IGI)		V		IGI bukan merupakan indikator yang digunakan dalam RPJMN 2015-2019, melainkan indikator yang diukur oleh organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan. IGI provinsi diukur terakhir kali pada tahun 2013 dengan menggunakan data tahun 2012, selanjutnya tidak lagi dilakukan pengukuran karena	IGI dihilangkan dari indikator RPJMD 2013-2018, sebagaimana hasil konsultasi tertulis dengan Bappenas. (Surat Direktur Aparatur Negara – Bappenas No. 4681/Dt.2.4/07/2015 tanggal 28 Juli 2015)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
						menunggu kebijakan dari negara donor.	
	b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	2) Promosi Jabatan Struktural secara terbuka	V				
		3) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	V				
	d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	4) Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui PTSP	V			Kelembagaan PTSP dapat berjalan optimal apabila pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditentukan: • Ada Standar Operasional Prosedur (SOP); • Ada Maklumat Pelayanan; • Ada personil yang melayani sesuai ketentuan.	
	e. Terwujudnya tertib administrasi	5) Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%)	V				
		6) Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akte kelahiran	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
		7) Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	V				
2. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel	a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	1) Implementasi Aksi PPK	V				
	b. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	2) Opini BPK (WTP)	V				
	c. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3) Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	V				
3. Melaksanakan penegakan hukum	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1) Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disusun	V				
		2) Persentase penindakan pelanggaran perda	V				

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 4 yaitu: (1) Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama; (2) Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa; (3) Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik; (4) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; (5) Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi; (6) Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik; (7) Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa; (8) Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa; dan (9) Meningkatnya Pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan Masyarakat.

Sasaran misi 4 diukur dengan 9 indikator sasaran, dengan capaian sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai. Secara rinci kinerja capaian indikator sasaran misi 4 dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 4 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Persentase penanganan konflik sosial	75	80	85	100	100	100	100	100			
2. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri	a. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga	1) Meningkatnya peran masyarakat/ sikap toleransi dan gotong royong	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
masyarakat	terhadap budaya dan jati diri bangsa												
	b. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik	1) Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100			
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	a. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	66,85	67,48	68,11	70,00	77,44	NA	77,44	110,63		Skor IDI 2015 baru akan terbit Th. 2016	
	b. Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi	1) Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu: • Pilgub dan wagub 2018 • Pilpres 2014 • Pilleg 2014 • Pilkada kab/kota 2017	58,46	-	-	75	-	-	-	-		1) Indikator persentase penggunaan hak pilih • Pilgub dan wagub baru akan dilaksanakan Th. 2018 • Pilpres dan Pileg baru akan dilaksanakan Th. 2019 2) Pilkada serentak 21 kab/kota se Jateng akan dilaksanakan Desember 2015	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
	c. Meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik	1) Persentase keterwakilan politik perempuan di Lembaga Parlemen	Prov: 21	Prov: 30	Prov: 30	Prov: 30	Prov: 24	Prov: 24		80,00		Target belum tercapai karena kapasitas SDM perempuan yang masih belum optimal	Pendidikan politik SDM perempuan bagi caleg, anggota parpol serta pemilih pemula
4. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan	a. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas budaya Jawa	1) Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian)	100	100	100	100	100	100	100	100			
	b. Meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	1) Persentase dan jumlah lokasi pelestarian cagar budaya	2,01 & 4 Lokasi	2,5 & 5 Lokasi	2,5 & 5 Lokasi	2,5 & 5 Lokasi	2,5 & 5 Lokasi	2,5 & 2 Lokasi	100	100			
	c. Meningkatkan Pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam	1) Penerapan kurikulum pelajaran budaya Jawa pada jenjang pendidikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
	kehidupan Masyarakat												

Untuk melihat keselarasan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada misi 4 dilakukan evaluasi keselarasan. Secara keseluruhan indikator sasaran yang ditetapkan telah selaras dan tepat untuk mengukur tujuan dan sasaran misi 4. Secara rinci evaluasi keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada misi 4 dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Misi 4

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Persentase penanganan konflik sosial	V				
2. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat	a. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa	1) Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong	V				
	b. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik	2) Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan	V				
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	a. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	V				
	b. Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi	2) Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	c. Meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik	Pemilu: • Pilgub dan wagub 2018 • Pilpres 2014 • Pilleg 2014 • Pilkada kab/ kota 2017					
		3) Persentase keterwakilan politik perempuan di Lembaga Parlemen	V				
4. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan	a. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa	1) Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian)	V			Dalam rangka memperkuat kelembagaan sosial masyarakat serta untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan diperlukan salah satu upaya peningkatan fungsi dan peran Seni Budaya Jawa dengan meningkatkan fungsi dan peran Bahasa Jawa dan meningkatkan kualitas masyarakat yang berkepribadian Jawa melalui Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan nilai-nilai budaya. Serta mencintai dan melestarikan budaya dan peninggalan sejarah dan purbakala/cagar budaya di Jawa Tengah serta meningkatkan tradisi jawa melalui jalur pendidikan.	
	b. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	2) Persentase dan jumlah lokasi pelestarian cagar budaya	V				
	c. Meningkatnya Pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan Masyarakat	3) Penerapan kurikulum pelajaran budaya Jawa pada jenjang pendidikan	V				

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Sasaran misi 5 RPJMD adalah Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah; dan Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator untuk mengukur ketercapaian target indikator sasaran adalah sebanyak 4 indikator. Sampai dengan tahun 2015, capaian indikator sasaran misi adalah sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator akan tercapai serta 2 indikator perlu upaya keras yaitu Indeks Gini dan Indeks Wiliamson. Secara rinci kinerja pencapaian sasaran misi 5 dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 5 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
1. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	1) Persentase pelaksanaan <i>rembug</i> masyarakat dalam pengambilan keputusan	100	100	100	100	100	100	100	100			
		2) Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	11,4	14,3	28,6	71,40	14,30	28,60	28,60	40,06		- Memenuhi salah satu indikator Kota Layak Anak. - Meskipun persentase capaian sebesar 40% namun capaian tahun 2014 dan 2015 sudah sesuai dengan target, sehingga	Untuk percepatan pencapaian target maka dilakukan upaya dengan menerbitkan pedoman partisipasi anak dalam pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
												diharapkan ada target akhir 2018 akan tercapai.	
2. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat	a. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1) Indeks Gini	0,352	0,349	0,347	0,337	NA	NA	0,387 *)capaian tahun 2013	87,08			
	b. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah	1) Indeks Williamson	0,7023	0,7015	0,7007	0,6986	NA	NA	0,6954 *)capaian tahun 2013	99,54			

Guna melihat keselarasan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, dilakukan evaluasi keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator. Evaluasi pada misi 5 menunjukkan hasil bahwa terdapat 2 indikator yang kurang selaras dengan tujuan dan sasaran yaitu Indeks Gini dan Indeks Williamson. Secara rinci evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Misi 5

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	a. Persentase pelaksanaan <i>rembug</i> masyarakat dalam pengambilan keputusan	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
pembangunan		b. Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	V				
2. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat	a. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	a. Indeks Gini		V		- Antara Tujuan, sasaran dan indikator sasaran nampak tidak selaras. - Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan, kurang pas ditempatkan pada pembangunan kewilayahan	Tujuan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat akan lebih pas jika sasarannya adalah persentase program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	b. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah	b. Indeks Williamson		V			

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 6 yaitu: Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan; Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR); Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan; Meningkatnya kualitas pendidikan; Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat; Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni; Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut, tergambarkan dari sebanyak 33 indikator sasaran, dengan capaian sebanyak 9 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 16 indikator berstatus akan tercapai, 8 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras meliputi: Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Kematian Balita (AKABA); Angka Kematian DBD, Angka Kesakitan DBD, Persentase *Drop Out* Keluarga Berencana, persentase *unmetneed*, dan APM SD/MI/SDLB/Paket A. Secara rinci capaian kinerja indikator sasaran misi 6 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 6 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Menurunkan angka kematian dan angka kesakitan	1) Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH	118,62	118	117,5	116	126,55	437 kasus (TW 3)	437 kasus (Tw 3)			Kondisi Kasus Kematian Ibu TW3 Tahun 2015 sebesar 437 kasus, masih sulit tercapai jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2018 sebesar 665 kasus, Hal ini disebabkan karena : domain penyebab kematian ibu bukan hanya dari sisi suply (provider) namun juga pada sisi demand (ibu, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya); sehingga untuk bisa menyelesaikan permasalahan disisi demand perlu upaya keras, serta kerjasama dengan lintas sektor terkait termasuk juga ibu, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Melihat kondisi tersebut sehingga diperlukan perubahan target pada tahun 2016-2018, berdasarkan perhitungan	Mengacu pada target AKI ditingkat Nasional yaitu 306/100.000 KH pada tahun 2019 sesuai dengan RPJMN 2014-2019 dan Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 hasil evaluasi terhadap penyebab AKI yang tinggi untuk tahun 2014 dan hasil review terhadap kasus kematian ibu s/d akhir Juli 2015; maka akan terjadi potensi tidak akan tercapainya target AKI untuk tahun 2015-2018 jika masih menggunakan target semula. Hal ini dikarenakan domain penyebab kematian ibu tidak hanya pada sisi suplay (provider), namun juga pada sisi demand (ibu, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya); sehingga untuk bisa menyelesaikan permasalahan disisi demand perlu upaya keras, serta kerjasama dengan lintas sektor

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
													terkait termasuk juga ibu, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya Penyesuaian target AKI Tahun: 2015 (128); 2016 (126); 2017 (125); 2018 (124).
		2) Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	10,41	12,5	12	11	10,08	3.709 kasus	3.709 kasus			Kondisi Kasus Kematian Bayi sudah melebihi target pada tahun 2018, namun untuk kematian Balita TW3 Tahun 2015 sebesar 4.258 kasus, masih sulit tercapai jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2018 sebesar 6400 kasus, Penyebab kematian balita banyak dipengaruhi oleh kurangnya SDM kesehatan yang kompeten, Sarana prasarana di puskesmas yang memadai, Gizi, budaya dan status ekonomi keluarga: Melihat kondisi tersebut sehingga diperlukan perubahan target pada tahun 2016-2018.	
		3) Angka Kematian Balita (AKABA)/1000 KH	11,80	11,9	11,85	11	11,54	4.258 kasus	4.258 kasus				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
		4) Angka Kematian DBD (%)	<1,2	<1	<1	<1	1,44	1,65	1,65	165,00		Pencapaian target untuk penanganan DBD masih belum mencapai target dikarenakan virulensi virus semakin kuat dan belum ada obat untuk virus dengue	Mendasarkan RPJMN 2014-2019 Untuk kematian DBD, tidak dijadikan indikator makro bid kesehatan, shg direkomendasikan untuk dipindahkan pada indikator BAB VIII dan diusulkan untuk diubah target Penyesuaian target kematian DBD tahun: 2016 (<2); 2017 (<2); 2018 (<2).
		5) Angka Kesakitan DBD (Per 100.000 penduduk)	45,52	<20	<20	<20	35,9	43,01	43,01	215,05		Masih belum tercapainya target RPJMD dikarenakan: a. Terjadinya penularan secara transovarial (telur nyamuk sudah terinfeksi virus DBD); b. Perubahan iklim yang tidak menentu; c. Belum ditemukan vaksin pencegahan penderita DBD; d. Peningkatan kasus di semua kabupaten kota; e. Vector penyebab penyakit DBD ada dimana-mana.	Dikarenakan terdapat Mengacu target angka kesakitan (IR) DBD pada RPJMN 2014-2019 Penyesuaian target kesakitan DBD: Tahun 2016 (<49); 2017 (<48); 2018 (<47).

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
	b. Menurunnya <i>Drop Out</i> (DO) KB dan <i>Unmet Need</i> serta meningkatnya peserta KB aktif/ <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	6) Persentase <i>Drop Out</i> Keluarga Berencana	15,09	14,75	14,50	13,50	15,02	N/A	15,02 (target s/d 2014)	88,74		Indikator ini perlu upaya keras yang dikarenakan banyak akseptor yang menggunakan kontrasepsi non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).	Untuk pencapaian target akhir, maka SKPD pengampu perlu melakukan upaya percepatan pencapaian target.
		7) Persentase <i>Unmet Need</i>	10,26	10	9,75	9	10,56	10,41	10,41	93,23		Capaian indikator ini perlu upaya keras yang disebabkan masih banyaknya akseptor menggunakan kontrasepsi non MKJP.	Untuk pencapaian target akhir, maka SKPD pengampu perlu melakukan upaya percepatan pencapaian target.
		8) Persentase <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	76	77	78	80	78,57	75,57	75,57	93,75			
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan	a. Meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan	1) Angka rata-rata lama sekolah	7,43	7,65	7,78	8,17	6,93	NA	NA			Angka rata-rata lama sekolah turun karena perubahan metodologi IPM	
		2) APK PAUD/TK	70,55	72,00	75,00	80,00	72,00	75,12	75,12	93,90			
		3) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100,52	100,54	100,56	100,60	100,54	100,69	100,69	100,08			
		4) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	70	72	74	80	73,05	74,01	74,01	92,51			
		5) APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,60	99,42	100	100	98,32	98,43	98,43	98,43		Target sulit tercapai karena banyaknya anak usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah di SD dan usia 12 tahun	Target capaian indikator perlu direvisi karena target RPJMD yang ditetapkan pada

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
												sudah masuk SMP, sehingga tidak masuk dalam hitungan APM SD/MI. Kondisi ini sangat mempengaruhi capaian APM SD/SDLB/MI/ Paket A.	dokumen perencanaan tidak akan tercapai karena pada prakteknya selalu terjadi pergeseran usia masuk sekolah jenjang SD/SDLB/MI/ Paket A.
		6) APM SMP/ SMPLB/MTs /Paket B	79,00	79,20	79,30	80,00	77,83	79,51	79,51	99,39			
	b. Meningkatkan kualitas pendidikan	1) Angka Kelulusan SD/SDLB/ MI	99,95	99,96	99,97	99,98	99,95	99,99	99,99	100,01			
		2) Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/ MTs	99,17	99,17	99,19	99,25	99,98	99,81	99,81	100,56			
		3) Angka Kelulusan SMA/ SMALB/MA /SMK	99,92	99,95	99,96	99,99	99,94	99,97	99,97	99,98			
		4) Persentase ruang kelas SD/SDLB/ MI sesuai SNP	61,53	64,50	65,00	70,50	61,70	67,97	67,97	96,41			
		5) Persentase ruang kelas SMP/ SMPLB/ MTs sesuai SNP	78,06	78,40	79,00	80,75	78,14	79,36	79,36	98,27			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
		6) Persentase ruang kelas SMA/SMALB/MA/SMK sesuai SNP	80,50	81,00	84,00	90,00	82,00	83,49	83,49	92,77			
		7) Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100,00			
		8) Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100			
		9) Persentase SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi	100	100	100	100	100	99,69	99,69	99,69			
		10) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4	74,00	75,00	76,00	80,00	75	80,18	80,18	100,22			
3. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	1) Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	732.050	768.653	807.085	934. 302	781.169	807.085	807.085	86,38			
		2) Jumlah koleksi buku yang tersedia di	203.126 Eks	213.282 Eks	223.946 Eks	259.246 Eks	219.626 Eks	231.784 Eks	231.784 Eks	89,41			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir 2018	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
		perpustakaan provinsi											
		3) Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	781	851	921	1.131	851	921	1.772	156,68			
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni	1) Persentase cakupan layanan air minum perkotaan	63,99	67,00	75,00	78,00	72,48	75,76	75,76	97,13			1. Akan dihitung target tahun 2015 berdasarkan basis realisasi tahun 2014. 2. Hasil butir 1 sebagai basis target tahun 2016 khusus untuk RTLH (air minum dan sanitasi sudah sesuai) dan memasukkan hasil pada perubahan RKPD Tahun 2016. 3. Melakukan penyesuaian target sasaran dan realisasi pada RPJMD.
		2) Persentase cakupan layanan air minum perdesaan	49,13	50,50	52,80	59,00	65,57	74,43	74,43	126,14		Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan air minum di pedesaan	
		3) Persentase cakupan layanan sanitasi	64,50	69,00	72,00	76,00	76,94	75,80	75,80	99,74			
		4) Rasio rumah layak huni	76,67	76,73	76,74	76,77	78,67	78,67	78,67	102,47		Capaian pada Tahun 2015 sama dengan realisasi Tahun 2014 dikarenakan adanya UU No. 23/2014, dimana penerima hibah harus berbadan hukum, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Untuk pencapaian target RTLH mulai Tahun 2016 dan selanjutnya, akan dipolakan dengan mekanisme bantuan sosial (berupa pemberian uang) dan hibah apabila penerima telah berbadan hukum.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
5. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	1) Persentase kondisi jaringan irigasi baik	72	74	76	82	74	75,75	75,75	93			
		2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	50,12	52	54	62,5	52,33	53,60	53,60	90			

Untuk mengetahui keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran misi 6, dilakukan evaluasi keselarasan terhadap hal tersebut. Hasil evaluasi keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada misi 6 diketahui bahwa secara keseluruhan indikator telah selaras dengan tujuan dan sasaran. Pada indikator sasaran urusan pendidikan akan dilakukan penyesuaian terkait dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan. Secara rinci evaluasi keselarasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Misi 6

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	1) Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH	V			Sasaran dalam Peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah penurunan angka kematian yang didukung oleh indikator (AKI, AKB &AKBA) sedangkan penurunan angka kesakitan hanya didukung oleh indikator (DBD)	Dalam penurunan angka kesakitan perlu ditambahkan indikator sasaran seperti pada IX yaitu (Prev gizi buruk, penemuan kasus TB, HIV/Aids, Diare, ISPA, Malaria,Kusta, Hipertensi & Diabetes Melitus)
	b. Menurunnya <i>Drop Out</i> (DO) KB dan <i>Unmet Need</i> serta meningkatnya peserta KB aktif/ <i>Contraceptive Prevalence Rate</i>	2) Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH	V				
		3) Angka Kematian Balita (AKABA)/ 1000 KH	V				
		4) Angka Kematian DBD (%)	V				
		5) Angka Kesakitan <i>DBD</i> (Per 100.000 pddk)	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	(CPR)	6) Persentase <i>Drop Out</i> Keluarga Berencana	V				
		7) Persentase <i>Unmet Need</i>	V				
		8) Persentase <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	V				
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan	a. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan	1) Angka rata-rata lama sekolah	V				
		2) APK PAUD/TK	V			Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, Kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, serta melaksanakan tugas pembantuan	Perlu adanya penyesuaian indikator dan target
		3) APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	V				
		4) APK SMA/SMALB/MA/ Paket C	V				
		5) APM SD/SDLB/MI/ Paket A	V				
		6) APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	V				
	b. Meningkatnya kualitas pendidikan	1) Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	V			Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, Kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, serta melaksanakan tugas pembantuan	Perlu adanya penyesuaian indikator dan target
		2) Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs	V				
		3) Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/SMK	V				
		4) Persentase ruang kelas SD/SDLB/MI sesuai SNP	V				
		5) Persentase ruang kelas SMP/SMPLB/MTs sesuai SNP	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
		6) Persentase ruang kelas SMA/SMALB/MA/SMK sesuai SNP	V				
		7) Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	V				
		8) Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	V				
		9) Persentase SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi	V				
		10) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4	V				
3. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	1) Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	V				
		2) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi	V				
		3) Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	V				
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni	4) Persentase cakupan layanan air minum perkotaan	V			Untuk pencapaian target RTLH mulai Tahun 2016 dan selanjutnya, akan dipolakan dengan mekanisme bantuan sosial (berupa pemberian uang) dan hibah apabila penerima telah berbadan hukum	
		5) Persentase cakupan layanan air minum perdesaan	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
		6) Persentase cakupan layanan sanitasi	V				
		7) Rasio rumah layak huni	V				
5. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	1) Persentase kondisi jaringan irigasi baik	V			1) Didalam RPJMD terdapat Infrastruktur fisik, Infrastruktur sosial Budaya dan Infrastruktur TI, Infrastruktur yang dimaksud dalam Misi 6 adalah Infrastruktur Fisik.	1) Meningkatkan penanganan infrastruktur fisik pertanian dalam arti luas
		2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	V			2) Adanya Pencanaan Membangun 1000 embung oleh Gubernur Jawa Tengah	2) Akan ada penyesuaian target % air baku

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 6 yaitu Meningkatkan kinerja penanganan jalan dan jembatan; Meningkatkan ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi; Meningkatkan penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai; Meningkatkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat; Meningkatkan cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi; Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut, tergambarkan dari sebanyak 20 indikator sasaran, dengan capaian sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, berstatus akan tercapai sebanyak 11 indikator, dan berstatus perlu upaya keras sejumlah 1 indikator. Indikator yang perlu upaya keras adalah: Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang. Secara rinci kinerja pencapaian sasaran misi 7 dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13
Capaian Target Indikator Sasaran Misi 7 Sampai dengan Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;	a. Meningkatkan kinerja penanganan jalan dan jembatan	1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86,54	86,92	87,56	89,60	86,92	87,88	87,88	98		Adanya kebijakan tahun infrastruktur dan ruas tuntas mempercepat capaian persentase jalan dalam kondisi baik.	Diperlukan revisi target capaian jalan dalam kondisi baik di akhir tahun 2018.
	b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	2) Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	50,44	54,14	59,00	77,87	55,24	61,34	61,34	79		Adanya kebijakan tahun infrastruktur dan ruas tuntas mempercepat capaian persentase jalan dalam kondisi baik dengan lebar $\geq 6,00$ m.	Diperlukan revisi target capaian jalan dalam kondisi baik di akhir tahun 2018.
	c. Meningkatkan penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai	3) Persentase panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	67,62	69,60	72,20	82,30	70,69	72,94	72,94	89		Adanya kebijakan tahun infrastruktur dan ruas tuntas mempercepat capaian persentase jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton) dalam kondisi baik.	Diperlukan revisi target capaian jalan dalam kondisi baik di akhir tahun 2018.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
	d. Meningkatkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	4) Jumlah kab/kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan massal di Jawa Tengah	1 Kab 1Kota	1Kota	2Kota	2Kota	1 Kota Kota Se- ma- rang, 1 Kota Sura- karta 1 Ka- wasan Bar- ling- mas- cakeb	1 Kota Se- ma- rang, 1 Kota Sura- karta, 1 Ka- wasan Bar- ling- mas- cakeb	1 Kota Sema- rang, 1 Kota Sura- karta, 1 Ka- wasan Bar- ling- mas- cakeb	150,00			
		5) Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan	-	-	1 desa	1 desa	1 Desa	7 Desa	7 Desa	700		Angkutan Desa mendasar UU 6 2014 Desa merupakan kewenangan desa (lokal desa), pemprov masih melakukan fasilitasi penyediaan angkutan pedesaan perintis sehingga perlu dilakukan penyesuaian indikator yang tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan angkutan pedesaan. Ada 2 trayek di Kab. Cilacap : ▪ Kawunganten – Citembong sepanjang 33	Penyesuaian indikator menjadi jumlah desa yang terlayani angkutan pedesaan perintis.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
												km (melewati 4 desa). ▪ Sidareja – Cimangsi sepanjang 20 km (melewati 3 desa)	
		6) Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	18,71	22,00	34,00	73,00	37,8	42,39	42,39	58,06			
		7) Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi	43	9	25	25 (s/d 2018: 109 lokasi)	12 Lo- kasi	15 Lokasi	27 Lokasi	25			
		8) Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir	100% (167.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	5.139 ha (161.861 ha)	3.750 Ha (158.111 ha)	8.889 ha (158.111 ha)	35,56			
		9) Terfasilitasnya pembangunan infrastruktur strategis	100%	100%	100%	100%	100%	750%	75%	75			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	35 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	59 SKPD	100%	60 SKPD	60 SKPD	100			
3. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	1) Persentase Informasi status mutu air (SPM)	100	100	100	100	100 (7)	100 (8)	100 (8)	100			
		2) Persentase Informasi status mutu udara ambien (SPM)	100	100	100	100	100 (35 Kab/Kota)	100 (35 Kab/Kota)	100 (35 Kab/Kota)	100			
		3) Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)	100	100	100	100	100	100	100	100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015		2014	2015					
		4) Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan	40	40	40	40	66,03	77,01	77,01	192,53			
		5) Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	5	10	15	30	10,85 (68.789 Ha)	1,67 (530 Ha)	1,67 (530 Ha)	41,80		Penanaman dilakukan sampai menunggu musim hujan (Desember)	Prakondisi lokasi kegiatan penanaman
		6) Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	8.959 Ha	10.000 Ha	20.000 Ha	50.000 Ha	15.109 Ha	9.005 Ha	20.000 Ha	40		Target pertahun adalah 10.000 Ha atau s/d Triwulan III th. 2015 20.000 Ha (kumulatif) sehingga realisasi s/d triwulan 3 sebesar 120% atau dibanding target s/d 2018 tercapai 54,21%	Target s/d 2018 akan tercapai dengan pertimbangan luas lahan hutan tidak bertambah namun dilakukan upaya penanaman 2 kali musim tanam pada lahan dibawah tegakan
		7) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,53	0,53	0,63	0,93	0,53	0,70	0,70	75,27		Sampai dengan triwulan II PDRB sektor kehutanan mencapai 0,70%,. Target th.2015 sebesar 0,63% optimis tercapai dengan mempertimbangkan faktor-faktor penunjang peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target PDRB adalah masuknya komponen produk hasil hutan bukan kayu (bambu) masuk dalam perhitungan PDRB

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD			Target Akhir	Realisasi		Capaian s/d 2015	% Capaian	Status Capaian	Penjelasan	Tindak Lanjut
			2013	2014	2015	2018	2014	2015					
		8) Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang	6,00	10,00	20,00	50,00	10	5	15	30		- Target tahun 2015 diperkirakan akan tercapai. - Meskipun persentase capaian sampai dengan tahun 2015 dibandingkan tahun 2018 sebesar 30%, namun indikator ini diperkirakan akan tercapai karena realisasi tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan target	Tetap didorong untuk melaksanakan kegiatan pada TW IV dan tahun berikutnya untuk pencapaian target akhir tahun RPJMD
4. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1) Jumlah BPBD kab/kota berdasar Perda	28	33	35	35	35	35	35	100,00			
		2) Jumlah Desa Tangguh Bencana	25	27	29	35	12	8	20	57,41			

Guna mengetahui keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran misi 7, dilakukan evaluasi keselarasan dengan hasil bahwa terdapat satu indikator yang perlu penyelarasan agar dapat menjadi ukuran capaian tujuan dan sasaran misi 7 yaitu jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi karena kurang tepat untuk mengukur cakupan masyarakat yang mengakses IT sesuai sasaran yang ditetapkan. Secara rinci evaluasi keselarasan antara tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada misi 7 dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14
Evaluasi Keselarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Misi 7

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;	a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	V			Terdapat penyesuaian panjang jalan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Kepmen PU Pera No. 248/KPTS/M/2015, sehingga diperlukan penyesuaian panjang jalan kewenangan Provinsi menjadi 2.618,457 Km (SK Gubernur masih dalam proses)	Diperlukan revisi SK Gubernur terkait penetapan ruas jalan kewenangan provinsi sekaligus pembaharuan data kondisi baik sesuai ruas jalan kewenangan provinsi yang terbaru (pasca alih status)
	b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	2) Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	V			Terdapat penyesuaian panjang jalan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Kepmen PU Pera No. 248/KPTS/M/2015, sehingga diperlukan penyesuaian panjang jalan kewenangan Provinsi menjadi 2.618,457 Km (SK Gubernur masih dalam proses)	Diperlukan pembaharuan data panjang jalan kewenangan provinsi dengan lebar $\geq 6,00$ m menyesuaikan ruas jalan kewenangan provinsi pasca alih status
	c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai	3) Persentase panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	V			Terdapat penyesuaian panjang jalan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Kepmen PU Pera No. 248/KPTS/M/2015, sehingga diperlukan penyesuaian panjang jalan kewenangan Provinsi menjadi 2.618,457 Km (SK Gubernur masih dalam proses)	Diperlukan pembaharuan data panjang jalan kewenangan provinsi standar jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton) menyesuaikan ruas jalan kewenangan provinsi pasca alih status
	d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan	4) Jumlah kab/kota yang melakukan pengembangan	V				Perlu ditambahkan indikator Jumlah terminal type B dioperasikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	angkutan umum dan massal di Jawa Tengah					1) Bukan indikator kinerja RPJMD akan tetapi indikator kinerja SKPD / Renstra SKPD. 2) Tetap.
		5) Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan	V				
		6) Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	V				
		7) Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi	V				
		8) Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir	V			Kewenangan PSDA sesuai Kemen PU, sampai dengan wilayah pantai, sehingga perlu penyesuaian pada SKPD pelaksana (dari BLH ke PSDA	
		9) Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi		V		Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi adalah indikator output (instrument untuk mencapai), tidak tepat mengukur sasaran cakupan masyarakat pengguna TI.	- Perlu indikator yang lebih pas mengukur sasaran cakupan pengguna IT, misalnya - Persentase masyarakat yang menggunakan pelayanan publik dengan IT (On-line), misalnya PKB <i>on-line</i>, perijinan <i>on-line</i>, dsb.
3. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	1) Persentase Informasi status mutu air (SPM)	V				
		2) Persentase Informasi status mutu udara ambien (SPM)	V				
		3) Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)	V				
		4) Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan	V				
		5) Persentase rehabilitasi hutan	V				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
		dan lahan kritis					
		6) Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	V				
		7) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	V				
		8) Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang	V				
4. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1) Jumlah BPBD kab/kota berdasar Perda	V			1) Lembaga (BPBD) merupakan pintu masuk untuk terintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan secara terpadu bersama SKPD teknis	
		2) Jumlah Desa Tangguh Bencana	V			2) Desa Tangguh bencana (Destana) merupakan prog unggulan dan berfungsi untuk menyiapkan masyarakat menghadapi bencana dg berbagai pendekatan (indikator dijelaskan pd Peraturan Ka, BNPB)	